

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepala Sekolah

1. Pengertian Kepala Sekolah

Dikutip dari buku karya Supardi, disebutkan bahwa “Kepala sekolah merupakan pemimpin pada sebuah lembaga sekolah. Karena bertugas memimpin sebuah lembaga pendidikan sekolah maka untuk menjadi kepala sekolah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan”.¹¹

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang diungkapkan Supriadi dalam buku Mulyasa bahwa “Erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta didik”.¹² Kepala sekolah juga bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang mana secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah.

¹¹ Supardi, *Sekolah Efektif (Konsep Dasar dan Prakteknya)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 27.

¹² Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 24-25.

Mulyasa juga menjelaskan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan, serta mendorong komponen dalam rangka mencapai tujuan dapat diwujudkan dengan tindakan kepala sekolah berupa rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap para guru, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Perilaku kepala sekolah yang positif dapat mendorong, mengarahkan, dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah.¹³

Dapat dikatakan, kepala sekolah merupakan pemimpin dalam lembaga pendidikan (sekolah), yang mana sangat berperan dan bertanggung jawab atas komponen-komponen di dalamnya. Kepala sekolah juga sebagai penentu atas keberhasilan yang dicapai oleh lembaga tersebut, oleh sebab itu perlunya syarat dan ketentuan yang ketat dalam penyaringan kepala sekolah.

2. Fungsi Kepala Sekolah

Dalam menjalankan perannya kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan manajemen sekolah agar dapat berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan kebutuhan zaman; khususnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.

¹³ Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, 17

Dalam upaya melakukan perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, Mulyasa menjelaskan dalam bukunya kepala sekolah memiliki fungsi, diantaranya:

a. Kepala sekolah sebagai pendidik (*Educator*)

Yaitu, kepala sekolah melakukan peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah dengan menggunakan strategi yang tepat, seperti menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat dorongan dan motivasi kepada warga sekolah, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik.

b. Kepala sekolah sebagai Manajer

Manajemen sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para anggota. Dalam hal ini kepala sekolah memiliki fungsi sebagai pemberdaya tenaga kependidikan melalui kerjasama, memberikan kesempatan serta dorongan kepada para anggota dalam meningkatkan profesinya.

c. Kepala sekolah sebagai Administrator

Secara spesifik seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi personil, administrasi sarana dan prasarana, administrasi kearsipan, dan administrasi

keuangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi-administrasi perlu dilakukan dengan efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah.

d. Kepala sekolah sebagai Supervisor

Kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan agar terciptanya efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

e. Kepala sekolah sebagai Leader

Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan dalam meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan.

f. Kepala sekolah sebagai Inovator

Kepala sekolah memiliki fungsi sebagai pemberbaru melalui strategi yang tepat, seperti menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh warga sekolah dan mengembangkan model pembelajaran yang inovatif.

g. Kepala sekolah sebagai Motivator

Kepala sekolah juga memiliki fungsi sebagai motivatur, yang mana tidak hanya memberikan arahan dan

pengawasan kepada para tenaga kependidikan namun juga dorongan dan motivasi.¹⁴

Daripada itu, perkiraan ke depan seorang kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai figur dan mediator sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian fungsi dan tugas seorang kepala sekolah semakin hari mengalami peningkatan, dan akan selalu meningkat sesuai dengan perkembangan pendidikan yang diharapkan.¹⁵

3. Tugas Kepala Sekolah

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh peran serta kepala sekolah sebagai pemimpin dalam melakukan pengelolaan. Adapun tugas-tugas seorang kepala sekolah menurut Munifah, sebagai berikut:

a. Memberikan bantuan langsung kepada guru

Wiles Glickman yang mendefinisikan, supervisi sebagai seorang pengawas sekaligus memberikan bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar. Dalam pengimplimentasiannya, kepala sekolah melakukan tiga hal, yaitu:

¹⁴ Ibid., 98-120.

¹⁵ Ibid., 98.

- 1) Membimbing guru dalam kegiatan membuat perencanaan mengajar.
- 2) Membantu guru dalam pengembangan kecakapan.
- 3) Membantu guru dalam memecahkan masalah.

b. Pengembangan kelompok

Dalam pelaksanaan sistem kelompok kerja seorang kepala sekolah memberikan binaan kepada guru terkait profesionalisme.

c. Pengembangan profesionalisme

Berkaitan dengan tugas seorang kepala sekolah yang mana juga seorang supervisor maka, kepala sekolah dituntut untuk mengembangkan profesionalisme seorang guru, salah satunya dengan cara memberika kesempatan kepada pendidik untuk melakukan peningkatan serta memberikan arahan dan dorongan dalam pelaksanaannya.¹⁶

Adapun Mulyasa merumuskan 11 langkah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi seorang kepala sekolah, diantaranya:

- a. Memahami misi dan tugas pokok;
- b. Mengetahui jumlah anggotanya;
- c. Mengetahui nama-nama anggotanya;
- d. Memahami tugas setiap anggotanya;
- e. Memperhatikan kehadiran anggotanya;
- f. Memperhatikan peralatan yang dipakai anggotanya (sarana dan prasarana);

¹⁶ Munifah, *Manajemen Pendidikan & Implementasinya* (Kediri: Stain Kediri, 2009). 105-106.

- g. Menilai anggotanya (evaluasi);
- h. Memperhatikan karier anggotanya;
- i. Memperhatikan kesejahteraan anggotanya;
- j. Menciptakan suasana kekeluargaan;
- k. Memberikan laporan kepada atasannya.¹⁷

4. Syarat- Syarat Kepala Sekolah

Untuk menjadi seorang kepala sekolah pastilah tidak mudah dan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun pendapat Mulyono yang dikutip dalam buku Purwanto menjelaskan, untuk menciptakan sekolah yang efektif seorang kepala sekolah haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
- b. Berpegang pada tujuan yang ingin dicapai
- c. Bersemangat
- d. Cakap di dalam memberikan bimbingan
- e. Cepat dan bijaksana di dalam mengambil keputusan
- f. Cerdas
- g. Cakap di dalam hal mengajar dan menaruh kepercayaan yang baik dan berusaha untuk mencapainya.¹⁸

Daryanto juga memaparkan dalam bukunya, seorang kepala sekolah memiliki syarat-syarat, diantaranya:

- a. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan pemerintah
- b. Mempunyai pengalaman kerja yang cakap, terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya
- c. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan
- d. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan

¹⁷ Mulyasa, *Manajmenen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, 58-59.

¹⁸ Ngalm Purwanto, *Manajemen Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 148-149.

- pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnnya
- e. Mempunyai ide dan isnpirasi yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya.¹⁹

Sehingga dapat disimpulkan, menjadi kepala sekolah tidaklah mudah. Sangat diperlukan persiapan dan kematangan baik dari fisik maupun dari diri, baik kompetensi maupun kealifikasi.

5. Kompetensi Kepala Sekolah

Dalam menjalankan perannya, kepala sekolah harus profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya, oleh sebabnya perlunya pengetahuan dan wawasan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah.

Greenfield menjelaskan kepala sekolah yang efektif setidaknya harus mengetahui, menyadari, dan memahami tiga hal:

- a. Mengapa pendidikan yang berkualiats diperlukan di sekolah;
- b. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas sekolah; dan
- c. Bagaimana mengelola sekolah secara efektif untuk mencapai prestasi yang tinggi.²⁰

Adapun kompetensi kepala sekolah sebagai pemimpin menurut Nur Zazin, adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai kepribadian yang kuat (jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani mengambil resiko dan berjiwa besar)
- b. Kemampuan mengawal anak bauh (guru, karyawan, atau staf TU)

¹⁹ Daryanto, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 92.

²⁰ Ibid., 19.

- c. Pemahaman terhadap visi dan misi sekolah, sekaligus dapat merealisasikan
- d. Kemampuan mengambil keputusan yang terampil (cepat, tepat, dan cekat)
- e. Kemampuan berkomunikasi (lisan, tulisan).²¹

Kepala sekolah dalam mengelola suatu pendidikan disyaratkan menguasai keterampilan dan kompetensi tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Pendapat Sahertian yang dikutip oleh Wahyu dalam bukunya menjelaskan “kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan suatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Kompetensi diperoleh.... dengan standar dan kualitas tertentu sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan”.²²

Begitu besarnya peran dan tanggung jawab seorang kepala sekolah, menuntutnya harus memiliki kompetensi serta menjalankan fungsi dan tugas kepala sekolah agar tercapainya tujuan. Selain itu wawasan dan pengetahuan yang luas sangat diperlukan dalam memudahkan kepala sekolah dalam menjalankan perannya. Sehingga membuatnya harus memiliki kompetensi, pengetahuan, wawasan, dan memenuhi syarat.

²¹ Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori & Aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 214.

²² Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)* (Bandung: Alfabeta, 2012), 28.

Jika diperinci lebih dalam kompetensi kepala sekolah, yaitu berupa ilmu pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan nilai-nilai, pemanfaatan dan peningkatan potensi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

B. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu memiliki pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan implimentasinya jika diterapkan pada sesuatu. Definisi mutu menurut Arcaro adalah “Sebuah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki ketergantungan pada biaya yang rendah”. Berbeda dengan Jarun, ia menyebutkan bahwa “mutu diartikan sebagai kesesuaian penggunaan atau tepat untuk pakai”.²³

Adapun definisi mutu menurut Crosby yang dikutip oleh Abdul Hadis dan Nur Hayati, yang menyatakan “mutu adalah sesuatu dengan yang disyaratkan atau di standarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila seseorang dengan standar atau kreteria mutu yang telah ditetapkan, standar mutu tersebut antara lain meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi”.²⁴

Abdul Hadis dan Nur Hayati juga menjelaskan bahwasannya para ahli pendidikan menyatakan, mutu merupakan hasil dari proses

²³ Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori & Aplikasi*, 54-55.

²⁴ Abdul Hadis dan Nur Hayati, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 85.

kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan hasil dari aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa, keduanya tersebut terwujud dari hasil kegiatan belajar mengajar berupa nilai rata-rata semua peserta didik.²⁵

Dalam pengertian secara umum, mutu dapat diartikan sebagai sebuah layanan untuk memenuhi spesifikasi yang ada. Bisa dikatakan bahwa mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sudah standar atau belum, atau dapat dikatakan mutu adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang, yang mana dengan ketentuan produk atau layanan tidak harus mahal dan eksklusif. Adapun mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome.

2. Kreteria Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan diukur secara keseluruhan baik dari segi *input*, proses, *output* maupun *outcome*. Ada 13 kreteria menurut Husaini Usman yang dinilai dalam hal mutu pendidikan yaitu :

a. Kinerja (*performan*)

Kinerja di sini berkaitan dengan aspek fungsional sekolah yang mana terdiri dari kinerja guru dalam mengajar. Hal ini mengingat guru merupakan tokoh utama dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

²⁵ Ibid., 97-98.

b. Waktu wajar (*timelines*)

Waktu wajar yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan waktu yang sesuai, seperti memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat.

c. Handal (*reliability*)

Yaitu seberapa lama pelayanan dapat berjalan, seperti pelayanan prima yang diberikan sekolah agar pihak penerima layanan puas dengan hasil kinerja yang diberikan.

d. Daya tahan (*durability*)

Daya tahan yang dimaksudkan adalah tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan.

e. Indah (*aesthetics*)

Indah di sini meliputi sarana dan prasarana yang disediakan pihak sekolah untuk menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar, misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik.

f. Hubungan manusiawi (*personal interface*)

Yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Hal ini bisa dicapai apabila terjalin komunikasi yang sehat.

g. Mudah penggunaannya (*easy of use*)

Yaitu, Mudah dalam penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dikembalikan tepat waktu. Hal ini agar supaya apa yang disediakan oleh sekolah dapat tepat guna.

h. Bentuk khusus (*feature*)

Yaitu adanya keunggulan tertentu, seperti sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi (komputerisasi).

i. Standar tertentu (*comformance to specification*)

Dalam pelaksanaan pembelajaran pastilah sekolah harus memenuhi standar tertentu, seperti sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal.

j. Konsistensi (*concistency*)

Konsistensi atau keajegan, konstan dan stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang, warga sekolah konsisten dengan perkataanya.

k. Seragam (*uniformity*)

Yaitu dalam upaya mencapai tujuan, dilaksanakan tanpa adanya variasi atau perbedaan, dan tidak tercampur. Misalnya sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu, seragam berpakaian.

l. Mampu melayani (*serviceability*)

Yaitu mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan baik sehingga pelanggan merasa puas.

m. Ketepatan (*accuracy*)

Yaitu ketepatan dalam pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah.²⁶

3. Standar Mutu Pendidikan

Hari Sudradjad menjelaskan bahwasannya:

Pendidikan yang bermutu adalah Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) mereka yang mampu mengintegalkan iman, ilmu, dan amal.²⁷

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu pastilah tidak mudah, yang mana membutuhkan upaya dan peran serta dari seluruh komponen sekolah. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas pastilah membutuhkan pengupayaan dalam kegiatan prosesnya.

²⁶ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 411.

²⁷ Hari Sudradjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK* (Bandung : Cipta Lekas Garafika, 2005), 17.

Adapun mutu pendidikan meliputi kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga pendidik.

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan pastilah terdapat standar yang harus dicapai. Dalam buku Sudarwan Danim, Uhar Suharsaputra memaparkan dalam PP 19 tahun 2005 menyebutkan bahwasannya pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar pendidikan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan.²⁸

Adapun delapan standar pendidikan yang dimaksudkan antara lain:

- a. Standar isi;
- b. Standar proses;
- c. Standar kompetensi lulusan;
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Standar sarana dan prasarana;
- f. Standar pengelolaan;
- g. Standar pembiayaan;
- h. Standar penilaian pendidikan.²⁹

4. Faktor Menghambat dan Pendukung Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan

Adapun masalah-masalah ataupun kendala-kendala yang ditemui ketika pelaksanaan peningkatan mutu yang dijelaskan oleh Mukhammad Abdullah adalah sebagai berikut:

²⁸ Sudarwan Darnim, *Otonomi Manajemen Sekolah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 146-148.

²⁹ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Asa Mandiri, 2007.

- a. Sikap mental para pengelola pendidikan, baik pemimpin maupun yang dipimpin yang mana kurangnya rasa tanggung jawab dan sepenuh hati membuatnya kurang optimal dalam pelaksanaannya.
- b. Tidak adanya tindak lanjut dari evaluasi program. Hampir semua program yang dijalankan dimonitor dan dievaluasi, namun setelahnya tidak ada tindak lanjut. Hal ini menjadikan pelaksanaan program selanjutnya menjadi kurang maksimal dan kurang begitu mengalami peningkatan.
- c. Gaya kepemimpinan yang tidak mendukung. Gaya kepemimpinan yang kurang mendukung, seperti kurang memberikan pengakuan, kurang memberikan pengakuan dan penghargaan. Hal ini menjadikan staf kurang termotivasi sehingga mempengaruhi hasil kinerja.
- d. Kurangnya rasa memiliki pada para pelaksana pendidikan. Kurangnya rasa memiliki dan terbuka dapat mengakibatkan akan banyaknya masalah yang timbul dan terbengkalai, hal ini dapat menjadi penghambat besar dalam upaya peningkatan pada mutu.³⁰

³⁰ Mukhammad Abdullah, *Manajemen dan Kepemimpinan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), 63.

Adapun faktor pendukung dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, seperti yang dijelaskan oleh Mortimore yang dikutip oleh Mukhammad Abdullah dalam bukunya adalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan sekolah yang positif dan kuat. Sistem kepemimpinan yang diterapkan di lembaga merupakan penentu dari keberhasilan, oleh sebabnya perlunya kepemimpinan yang kuat karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai.
- b. Harapan yang tinggi. Harapan merupakan pemulus dalam pelaksanaan peningkatan mutu, dengan adanya harapan dapat memperlancar dalam kegiatan pelaksanaan.
- c. Monitor terhadap kemajuan siswa. Dengan dilakukan monitor secara kontinyu terhadap siswa dapat memberikan umpan balik dari siswa sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan.
- d. Tanggung jawab siswa dan keterlibatannya dalam kehidupan sekolah. Pendidikan yang telah diterapkan akan dianggap sukses dan berkualitas apabila menghasilkan keluaran atau lulusan yang berkualitas pula, seperti tanggungjawab, disiplin, kreatif dan berketerampilan.
- e. Intensif dan hadiah. Dengan diberlakukannya pendidikan yang intensif dan pemberian hadiah, akan dapat

meningkatkan usaha dan daya saing siswa dalam meraih prestasi.

- f. Keterlibatan orang tua dalam kehidupan sekolah. Pernyataan ini sudah sangat umum, namun hal tersebut benar adanya. Dengan keterlibatan orang tua, maka mutu pendidikan akan dapat mengalami peningkatan, hal ini tentu juga diperlukan rencana yang terstruktur dan peran aktif yang nyata.
- g. Perencanaan dan pendekatan yang konsisten. Dengan dirancangnya pendidikan secara matang dan teliti serta menggunakan pendekatan yang tepat, maka peningkatan dapat terjadi.³¹

C. Kelas Inklusi

1. Pengertian Kelas Inklusi

Dalam bukunya David Smith menjelaskan, kelas inklusi merupakan istilah baru yang dipergunakan untuk menggambarkan pernyataan bagi anak-anak berkelainan ke dalam program-program sekolah. Istilah ini bagi sebagian besar pendidik dipandang sebagai hal positif dalam usaha menyatukan anak-anak yang memiliki

³¹ Ibid., 89-91.

hambatan melalui cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyuruh.³²

Kelas inklusi merupakan program sekolah yang diperuntukan bagi anak yang mengalami kesulitan belajar termasuk di dalamnya anak berkubutuhan yang disediakan oleh sekolah umum. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, sekolah tersebut menerapkan sistem pendidikan inklusif yang mana menggabungkan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus ketika kegiatan belajar mengajar walau tidak seluruhnya.

Menurut Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1: “Peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa”.³³

Setiap anak pastilah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kurang maupun kelebihan tersebut menjadikan ciri khas pada anak tersebut. Anak berkebutuhan merupakan salah satu contoh ciri khas pada diri seorang anak.

³² David Smith, *Sekolah Inklusif (Konsep dan Penerapan Pembelajaran)*, terj. Denis, Ny. Enrica (Bandung: Nuansa, 2012), 45.

³³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.

Menurut pendapat Mulyono yang dikutip oleh Triyanto, menyebutkan bahwa “anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang mempunyai kecacatan atau yang menyandang katunaan, dan juga anak latih dan berbakat”.³⁴

Dengan kata lain anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kekurangan baik bersifat permanen atau sementara yang membuatnya tidak mampu untuk melakukan sesuatu secara normal sehingga membuatnya memperoleh pelayanan secara intens, contohnya pendidikan. Kekurangan itu sendiri disebabkan baik karena faktor keturunan ataupun faktor dari luar, seperti kecelakaan, lingkungan, atau ekonomi.

Keterkaitan anak berkebutuhan khusus dengan penerapan pendidikan inklusi pada kelas inklusi sendiri, yaitu untuk menjawab kekhawatiran anak ABK selama ini yang mana membutuhkan pendidikan khusus sehingga tidak terjadi diskriminasi pada anak berkebutuhan khusus baik dari segi sosial maupun pendidikan.

Mohammad Takdir Ilahi menjelaskan, perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus memiliki sejarah yang cukup panjang, mulai dari penyelamatan anak berkubutan khusus dari ketidakadilan dan ketidakberpihakkan serta sikap diskriminasi, hal ini menjadikan pemerhati pendidikan sangat berupaya dalam memberikan hak bagi anak berkebutuhan khusus. Seiring

³⁴ Triyanto dan Desty Ratna Permatasari, “Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi”, Sekolah Dasar, 2 (November, 2016), 177.

perkembangan zaman istilah dan konsep anak berkebutuhan khusus berkembang seiring dengan munculnya paradigma baru di dunia pendidikan terutama pada pendidikan inklusif, yang mewarnai perjalanan setiap anak berkebutuhan khusus di Indonesia dalam menghadapi segala pelabelan negatif yang diarahkan kepada mereka.³⁵

Muhammad Takdir Ilahi juga menjelaskan, konsep pendidikan inklusi yang diterapkan pada sekolah yang menyediakan kelas inklusi, menerapkan konsep keterbukaan dalam menerima siswa yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang mengalami kesulitan belajar. Munculnya sekolah inklusi bukan sebagai pengganti dari sekolah luar biasa (SLB) melainkan sebagai alternatif, inovasi, pilihan serta terobosan baru dalam dunia pendidikan.³⁶

Adapun pengertian tentang pendidikan inklusi yang beragam dari beberapa ahli yang dikutip oleh Indah dan Binahayati, adalah sebagai berikut:

- a. Tarmansyah, mengatakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama.
- b. Tarmansyah, mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler.
- c. L.K.M. Marentek, mengemukakan pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti berkelainan, lamban belajar (*slow learner*) maupun yang berkesulitan belajar lainnya.³⁷

³⁵ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusi: Konsep dan Aplikasi Aplikasi*, 137.

³⁶ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusi Konsep dan Aplikasi*, 24-25.

³⁷ *Ibid.*, 224.

Dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang dirancang secara khusus bagi anak yang mengalami kesulitan salah satunya anak penyandang kecacatan atau anak berkebutuhan khusus yang berada dalam kelas inklusi guna dapat menerima haknya dalam bidang pendidikan melalui model ataupun desain pendidikan yang bermacam-macam.

2. Tujuan Kelas Inklusi

Bandi Delphie menyatakan, terjadinya hambatan atau bahkan ketidak fungsian pada perkembangan anak meliputi, aspek sensorimotor, kreativitas, interaksi sosial, dan berbahasa. Hal ini dapat mengakibatkan anak mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah. Kesulitan-kesulitan yang terjadi berkaitan dengan kelainan-kelainan yang terjadi.³⁸

Adapun tujuan dari adanya penyelenggaran kelas inklusi pada sekolah inklusi menurut Bandi Dephie, diantaranya:

- a. Mengembangkan pribadi, bakat, dan kemampuan mental serta fisik peserta didik seoptimal mungkin;
- b. Menyiapkan peserta didik untuk kehidupan orang dewasa yang aktif dalam masyarakat bebas dan mengangkat penghargaan bagi orang tua anak, identitas budaya sendiri, bahasa, serta nilai-nilainya.³⁹

³⁸ Bandi Dephie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, 141.

³⁹ *Ibid.*, 141.

Tujuan diadakannya kelas inklusi melalui pendidikan inklusi sendiri untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus agar mendapat pendidikan yang layak dan melatih anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat beradaptasi serta bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya, serta untuk mengembangkan pendidikan inklusif yang efektif, fleksibel, dan tanggapan keanekaragaman gaya dan kecepatan belajar.

Ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang pernah terjadi juga termasuk bagian dari pelanggaran HAM yang mesti ditegakkan serta diperjuangkan. Anak berkebutuhan khusus atau penyandang cacat seringkali direnggut dari haknya, karena anggapan bahwa penyandang cacat dipandang sebagai umat manusia yang tidak utuh. Maka, pengecualian pun diberlakukan dalam hal hak universalnya.

Pendidikan inklusi menjadi cerminan dari perjuangan untuk menegakkan HAM. Menurut UNISCO :

*At the core of inclusive education in the human right to education, pronounced in the Universal Declaration of Human Rights in 1949. Equally important in the right of children not to be discriminated against, stated in Article 2 of the Convention on the Right of the Child. A logical consequence of the right is that all children have the right to receive the kind of education that does not discriminate on grounds of disability, ethnicity, religion, language, gender, capabilities, and so on.*⁴⁰

⁴⁰ Ibid., 93-94.

Uraian di atas menjelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Hal ini telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia di tahun 1949, yang mana menyebutkan bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasi pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, gender, kepebilitas, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan berkembangnya pendidikan di Indonesia, inovasi-inovasi baru pun mulai diterapkan dalam rangka memajukan dunia pendidikan. Begitupun halnya dengan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Agar anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang layak serta dapat berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya, pendidikan inklusi pun mulai diterapkan. Dengan diterapkannya pendidikan inklusi diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat berkembang dan hidup lebih baik.

3. Model Pembelajaran Kelas Inklusi

Bandi Delphie menjelaskan, bahwasannya konsep pendidikan yang cocok digunakan bagi anak berkebutuhan khusus dalam pelaksanaan kelas inklusi adalah model pembelajaran berdasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi. Model tersebut dirancang oleh guru sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik guna dapat mengembangkan ranah pendidikan sebagai sasaran akhir

pembelajaran. Model ini dipandang dapat menunjang gerakan peningkatan mutu pendidikan pada anak berkebutuhan khusus yang telah dirancang oleh pemerintah selama ini.⁴¹

Maksud dipilihnya pendidikan berbasis kompetensi disini, dikarenakan pendidikan berbasis kompetensi berisikan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak, sehingga anak berkebutuhan khusus mendapat pengalaman secara langsung dalam dirinya sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermasyarakat.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, kelas inklusi pastilah memiliki ciri khasnya tersendiri sehingga menjadikannya sebagai kelas khusus. Muhammad Takdir Ilahi menyebutkan model pembelajaran dalam pendidikan inklusif yang diterapkan pada kelas inklusi, sebagai berikut:

a. Kurikulum yang Fleksibel

Kurikulum yang diterapkan pada kelas inklusi tidaklah sama dengan yang diterapkan pada kelas reguler. Kurikulum yang didapat dari pusat dimodif sedemikian rupa, karena kurikulum yang diterapkan pada kelas inklusi tidak menekankan pada materi pelajaran ataupun

⁴¹ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 149.

pemahaman, melainkan pemberian perhatian khusus pada peserta didik.

b. Pendekatan Pembelajaran yang Fleksibel

Pendekatan pembelajaran yang diterapkan pada kelas inklusi bersifat fleksibel yang mana memberikan kemudahan kepada anak dalam melaksanakan kegiatan belajar agar potensi dan keterampilan mereka dapat berkembang.

c. Sistem Evaluasi yang Fleksibel

Dalam pelaksanaan pendidikan yang diterapkan di kelas inklusi menggunakan sistem penilaian yang fleksibel, yang mana disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan anak inklusi.

d. Pembelajaran yang Ramah

Konsep pendidikan inklusif yang diterapkan di kelas inklusi harus mencerminkan pembelajaran yang ramah, dengan hal ini diharapkan agar anak semakin termotivasi dan terdorong untuk mengembangkan potensi dan skill anak.⁴²

⁴² Muhammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusi Konsep dan Penerapannya*, 45-47.

Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan guna menciptakan sekolah dan kelas inklusi yang lebih inklusi menurut Wisniewski Alper yang dikutip oleh David Smith, adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Jaringan kerja

Orang tua, kepala sekolah, pendidik dan masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan dukungan dengan cara menciptakan lingkungan yang inklusif.

b. Sumber penilain sekolah dan masyarakat

Anggota sekolah dan masyarakat melakukan penilaian terhadap layanan yang diberikan oleh sekolah, agar sekolah dapat melakukan pengembangan dan perbaikan dalam memberikan pelayanan.

c. Tinjauan terhadap penerapan strategi inklusi

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam upaya pensuksesan kelas inklusi melakukan tinjauan terhadap penerapan strategi, seperti ketepatan, kesesuaian dan keefektifan.

d. Strategi-startegi penerapan inklusi

Dalam hal ini pihak terkait menerapkan pendidikan inklusi agar dapat tewujud tujuan dari diadakannya kelas inklusi.

e. Pengembangan umpan balik dan sistem evaluasi

Langkah ini dilaksanakan setelah semua pihak terkait mengumpulkan dan mengevaluasi sampai dimana strategi-strategi yang telah diterapkan berhasil.⁴³

⁴³ David Smith, *Sekolah Inklusi (Konsep dan Penerapan Pendidikan)* terj. Danis, Ny. Enrica, 398-399.